**BAB II**

**TINJAUAN PUSTAKA**

1. **Kesejahteraan Sosial**

 **1. Pengertian Kesejahteraan Sosial**

Kesejahteraan sosial merupakan ilmu yang mempelajari tentang kondisi kehidupan sosial dalam masyarakat yang mengharapkan terciptanya kesejahteraan dalam kehidupan masyarakat. Konsep kesejahteraan sosial sebagai suatu program yang terorganisir dan sistematis yang dilengkapi dengan segala macam keterampilan ilmiah, merupakan suatu konsep yang relatif baru berkembang, terutama di Negara-negara berkembang. Kesejahteraan sosial memiliki arti keadaan yang baik, kebahagiaan dan kemakmuran, banyak orang yang menamainya sebagai kegiatan amal. Konsep kesejahteraan sosial menurut James Midgley ( 2005:21) adalah sebagai berikut :

Kesejahteraan sosial adalah suatu kondisi yang terdiri dagi tiga elemen utama pertama, sejauh mana masalah-masalh sosial ini diatur. Kedua, sejauh mana kebutuhan-kebutuhan dipenuhi dan ketiga, sejauh mana kesempatan untuk meningkatkan taraf hidup dapat disediakan. Ketiga elemen ini berlaku bagi individu, keluarga, kelompok, komunitas bahkan seluruh masyarakat. Ketiga elemen ini selanjutnya dapat bekerja pada level sosial yang berbeda dan harus diaplikasikan ketika sebuah masyarakat secara menyeluruh ingin menikmati apa yang dimaksud dengan kesejahteraan sosial.

 Pengertian di atas menyatakan bahwa kesjahteraan sosial menunjuk pada peningkatan kualitas hidup dalam masyarakat untuk mencegah masalah-masalah sosial yang terjadi di dalam masyarakat baik individu, kelompok atau masyarakat itu sendiri. Untuk mendorong dan mencapai ke arah kehidupan yang lebih baik. Berdasarkan UU No 11 tahun 2009 disebutkan bahwa: “Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya” (Soeharto, 2009 : 154).

 Sedangkan menurut Friedlander dalam ( Fahrudin, 2013:9 ), adalah sebagai berikut :

Kesejahteraan sosial adalah sistem yang terorganisir dari pelayanan-pelayanan sosial dan institusi-institusi yang dirancang untuk membantu individu-individu dan kelompok-kelompok guna mencapai standar hidup dan kesejahteraan yang memadai dan relasi-relasi personal dan sosial sehingga memungkinkan mereka dapat mengembangkan kemampuan dan kesejahteraan sepenuhnya selaras dengan kebutuhan-kebutuhan keluarga dan masyarakatnya.

 Adanya pemenuhan kebutuhan oleh masyarakat baik itu materil, spiritual sehingga akan mendorong masyarakat menuju ke arah kualitas hidup yang lebih baik dan dan mencapai fungsi sosialnya, apabila pemenuhan kebutuhan tadi semuanya sudah tercukupi. Dalam hal ini tangung jawab pemerintah dalam peningkatan kualitas kehidupan warga masyarakatnya yang perlu ditingkatkan.

 Perkembangan ilmu kesejahteraan sosial pada dasarnya merupakan lanjutan serta penyempurnaan dalam meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat. Secara garis besar dalam membangun kesejahteraan sosial sama dengan apa yang dilakukan dalam pekerjaan sosial. Pekerjaan sosial mendorong pemecahan masalah dalam kaitannya dalam relasi kemanusiaan, perubahan sosial, pemberdayaan dan pembebasan manusia, serta perbaikan masyarakat.

Dalam pekerjaan sosial adanya kegiatan pemberian pelayanan sosial agar individu mampu menjalankan fungsi sosialnya di masyarakat sebagai biasanya. Menurut Zastrow ( Huraerah, 2011:38 ) definisi Pekerjaan Sosial adalah :

Pekerjaan sosial adalah aktivitas professional untuk menolong individu, kelompok, dan masyarakat dalam meningkatkan atau memperbaiki kapasitas mereka agar berfungsi sosial dan menciptakan kondisi-kondisi masyarakat yang kondusif untk mencapai tujuan tersebut.

Berdasarkan definisi di atas, permasalahan dalam bidang pekerjaan sosial erat kaitannya dengan masalah sosial yang di hadapi baik individu, kelompok dan juga masyarakat, serta mampu memperbaiki kualitas hidup dan mampu mengembalikan fungsi sosialnya kembali di masyarakat.

**2. Fungsi Kesejahteraan Sosial**

Fungsi-fungsi kesejahteraan sosial bertujuan untuk menghilangkan atau mengurangi tekanan-tekanan yang diakibatkan terjadinya perubahan-perubahan sosio-ekonomi, menghindarkan terjadinya konsekuensi-konsekuensi sosial yang negatif akibat pembangunan serta menciptakan kondisi-kondisi yang mampu mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat. Adapun fungsi-fungsi kesejahteraan sosial menurut Fahrudin ( 2012:12 ) yaitu sebagai berikut :

1. Fungsi Pencegahan *(Preventive)*

 Kesejahteraan sosial ditujukan untuk memperkuat individu, keluarga, dan masyarakat supaya terhindar dari masalah-masalah sosial baru. Dalam masyarakat transisi, upaya pencegahan ditekankan pada kegiatan-kegiatan untuk membantu menciptakan pola-pola baru dalam hubungan sosial serta lembaga-lembaga sosial baru.

1. Fungsi Penyembuhan *(Curative)*

 Kesejahteraan sosial ditujukan untuk menghilangkan kondisi-kondisi ketidak mampuan fisik, emosional, dan sosial agar orang yang mengalami masalah tersebut dapat berfungsi kembali secara wajar dalam masyarakat. Dalam fungsi ini tercakup juga fungsi pemulihan (rehabilitasi).

1. Fungsi Pengembangan *(Development)*

 Kesejahteraan sosial berfungsi untuk memberikan sumbangan langsung ataupun tidak langsung dalam proses pembangunan atau pengembangan tatanan dan sumber-sumber daya sosial dalam masyarakat.

1. Fungsi Penunjang *(Support)*

 Fungsi ini mencakup kegiatan-kegiatan untuk membantu mencapai tujuan sektor atau bidang pelayanan sosial kesejahteraan sosial yang lain.

Berdasarkan kutipan di atas, bahwa dalam kesejahteraan sosial terdapat fungsi dan proses dalam membantu individu, kelompok ataupun masyarakat agar dapat berfungsi kembali dengan menyelenggarakan pelayanan kesejahteraan sosial, terhindar dari masalah sosial baru, serta mengurangi tekanan-tekanan yang diakibatkan dari terjadinya perubahan-perubahan sosial ekonomi.

**3. Tujuan Kesejahteraan Sosial**

Dalam penerapannya di lingkungan sosial masyarakat, kesejahteraan sosial memiliki tujuan-tujuan yang sangat mulia guna mencapai suatu taraf kehidupan yang diharapkan oleh masyarakat. Ada dua tujuan utama dari kesejahteraan sosial menurut Fahrudin ( 2012:10 ) yaitu sebagai berikut :

1. Untuk mencapai kehidupan yang sejahtera dalam arti tercapainya standar kehidupan pokok seperti sandang, perumahan, pangan, kesehatan, dan relasi-relasi sosial yang harmonis dengan lingkungannya.
2. Untuk mencapai penyesuaian diri yang baik khususnya dengan masyarakat di lingkungannya, misalnya dengan menggali sumber-sumber, meningkatkan, dan mengembangkan taraf hidup yang memuaskan.

Melihat kutipan di atas, tujuan dari kesejahteraan sosial memiliki manfaat yang besar bagi masyarakat diantaranya, dapat terpenuhinya standar kehidupan pokok yang dibutuhkan oleh masyarakat serta menggali sistem sumber yang dapat mengembangkan taraf hidup masyarakat menuju kehidupan yang lebih baik.

1. **Bidang-Bidang Pelayanan Kesejahteraan Sosial**

 Secara subtantif bidang kesejahteraan sosial atau bisa disebut juga bidang usaha kesejahteraan sosial atau pelayanan sosial atau juga disebut sebagai praktik pekerjaan sosial, terdiri dari berbagai cakupan yang saling terkait satu dengan lainnya. Menurut Fahrudin ( 11:2012 ) bidang-bidang pelayanan kesejahteraan sosial antara lain :

1. Kesejahteraan anak dan keluarga.
2. Kesejahteraan remaja dan generasi muda.
3. Kesejahteraan orang lanjut usia.
4. Pelayanan kesejahteraan sosial umum (*public social welfare services).*
5. Pelayanan rekreasional.
6. Pelayanan sosial koreksional.
7. Pelayanan kesehatan mental.
8. Pelayanan sosial medis.
9. Pelayanan sosial bagi penyandang cacat.
10. Pelayanan sosial bagi wanita.
11. Pelayanan sosial perumahan dan lingkungan.

 Berdasarkan kutipan diatas, secara garis besar bidang-bidang pelayanan kesejahteraan sosial atau bidang usaha kesejahteraan merupakan berbagai macam pelayanan guna menanggulangi berbagai macam permasalahan sosial yang sering dihadapi dalam kehidupan masyarakat pada umumnya.

**B. Pelayanan Sosial**

**1. Pengertian Pelayanan Sosial**

 Pelayanan sosial memiliki arti yang sangat luas dan bermacam-macam di tiap Negara. tetapi mempunyai garis besar dan kesamaan yaitu mempromosikan kesejahteraan. Di Inggris, istilah itu digunakan untuk pelayanan servis dan manfaat benefit yang berorientasi orang. Definisi Pelayanan sosial menurut Soeharto ( 2009:154 ) adalah sebagai berikut :

 Pelayanan sosial merupakan aksi atau tindakan untuk mengatasi masalah sosial. Pelayanan sosial dapat diartikan sebagai seperangkat program yang ditujukan untuk membantu individu atau kelompok yang mengalami hambatan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

 Adapun definisi mengenai Pelayanan Sosial menurut Huraerah ( 2011:45 ) adalah sebagai berikut :

 Kegiatan teroganisir yang ditunjukan untuk membantu warga Negara yang mengalami permasalahan sebagai akibat ketidakmampuan keluarga melaksanakan fungsi-fungsinya. Kegiatan ini antara lain berupa pelayanan sosial bagi anak ( termasuk balita dan remaja ) serta usia lanjut terlantar atau mengalami berbagai bentuk kecacatan.

 Melihat definisi di atas bahwa adanya penyelenggaraan pelayanan bertujuan untuk meningkatkan dan mempertahankan keberfungsian sosial seseorang agar kembali seperti biasanya. Pelayanan sosial didasari keyakinan bahwa tindakan sosial dan pengorganisiran sosial merupakan suatu wujud nyata dari kebijakan sosial sebagai representasi kehendak publik dalam mempromosikan kesejahteraan negara.

 **2. Fungsi Pelayanan Sosial**

 Pelayanan sosial diadakan untuk melindungi, mengadakan perubahan, atau menyempurnakan kegiatan-kegiatan pendidikan, asuhan anak, penanaman nilai, dan pengembangan hubungan sosial yang di masa lampau menjadi fungsi keluarga, lingkungan tetangga, dan kerabat. Pelayanan sosial cenderung menjadi pelayanan yang ditujukan kepada golongongan masyarakat yang membutuhkan pertolongan dan perlindungan khusus. Menurut Muhidin ( 1992:42 ) menjelaskan tentang fungsi-fungsi pelayanan sosial adalah.

1. Peningkatan kondisi kehidupan masyarakat.
2. Pengembangan sumber-sumber manusiawi.
3. Orientasi masyarakat terhadap perubahan-perubahan sosial dan penyesuaian sosial.
4. Mobilitas dan pencipta sumber-sumber masyarakat untuk tujuan pembangnan.
5. Penyediaan dan penyelenggaraan struktur kelembagaan untuk tujuan agar pelayanan-pelayanan yang terorganisir dapat berfungsi.

 Pelayanan sosial merupakan aktivitas yang mempunyai misi membantu individu, kelompok, ataupun khalayak umum agar mereka mampu memenuhi kebutuhan-kebutuhannya, yang pada akhirnya mereka diharpakan dapat memecahkan permasalahan yang ada melalui tindakan-tindakan kerjasama ataupun melalui pemanfaatan sumber-sumber yang ada di masyarakat untuk memperbaiki kondisi kehidupannya.

C. **Persepsi**

 **1. Pengertian Persepsi**

 Individu hidup dalam dunia benda dan manusia, suatu dunia yang membanjiri indera dengan berbagai stimulus. Segala informasi tentang dunia akan sampai ke individu melalui indera. Indera dapat mengingatkan individu akan bahaya serta memberikan informasi yang dibutuhkan untuk menafsirkan berbagai peristiwa dan mengantisipasi masa depan. “Persepsi adalah pengalaman tentang objek, peristiwa atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan Persepsi adalah memberikan makna pada stimulus inderawi” ( Rakhmat, 2012:50 ).

 Tentunya ada berbagai macam pengertian persepsi yang diberikan oleh para ahli, adapun pengertian persepsi menurut ahli lainnya adalah sebagai berikut “Proses kognitif yang dialami oleh setiap individu dalam memahami informasi yang datang dari lingkungan melalui inderanya” ( Desmita, 2010:108 ).

 Berdasarkan kutipan diatas persepsi pada dasarnya menyangkut hubungan manusia dengan lingkungannya, bagaimana ia mengerti dan menginterpretasikan stimulus yang ada di lingkungannya. Setelah individu menginderakan objek di ingkungannya, kemudian ia memproses hasil peginderaannya itu, sehingga timbulah makna tentang objek itu pada dirinya.

1. **Proses Terjadinya Persepsi**

 Proses terjadinya persepsi pada diri individu tidak berlangsung begitu saja, tetapi melalui proses. Proses persepsi adalah peristiwa dua arah yaitu sebagai hasil aksi dan reaksi. Menurut Walgito (2002:54), terjadinya persepsi melalui suatu proses, yaitu melalui beberapa tahap sebagai berikut :

* 1. Suatu objek atau sasaran menimbulkan stimulus, selanjutnya stimulus tersebut ditangkap oleh alat indera. Proses ini berlangsung secara alami dan berkaitan dengan segi fisik. Proses tersebut dinamakan proses kealaman.
	2. Stimulus suatu objek yang diterima oleh alat indera, kemudian disalurkan ke otak melalui syaraf sensoris. Proses pentransferan stimulus ke otak disebut proses psikologis, yaitu berfungsinya alat indera secara normal.
	3. Otak selanjutnya memproses stimulus hingga individu menyadari objek yang diterima oleh alat inderanya. Proses ini juga disebut proses psikologis. Dalam hal ini terjadilah adanya proses persepsi yaitu suatu proses dimana individu mengetahui dan menyadari suatu objek berdasarkan stimulus yang mengenai alat inderanya.

 Berdasarkan kutipan diatas bahwa persepsi lahir dari suatu proses dimana awalnya objek atau sasaran menimbulkan stimulus yang ditangkap oleh indera pada setiap manusia, kemudian disalurkan ke otak melalui syaraf sensoris, dan memproses stimulus hingga manusia menyadari objek yang yang diterima oleh inderanya. Setelah tahapan tersebut dilalui maka manusia tersebut telah bisa mempersepsi suatu objek.

**3. Faktor Fungsional dan Struktural yang Menentukan Persepsi**

 Ada beberapa faktor yang menentukan persepsi diantaranya, faktor fungsional dan faktor struktural. Faktor fungsional berasal dari kebutuhan, pengalaman masa lalu dan hal-hal lain yang termasuk apa yang kita sebut sebagai faktor-faktor personal, sedang faktor struktural berasal semata-mata dari sifat stimulus fisik dan efek-efek saraf yang ditimbulkannya pada sistem saraf individu.

1. Faktor fungsional

Faktor fungsional berasal dari kebutuhan, pengalaman masa lalu dan hal-hal yang termasuk apa yang kita sebut sebagai faktor-faktor personal. Yang menentukan persepsi bukan jenis atau bentuk stimulus, tetapi karakteristik orang yang memberikan respons pada stimulus itu. Dalam suatu eksperimen, Levine, Chein, dan Murphy memperlihatkan gambar-gambar yang tidak jelas kepada dua kelompok mahasiswa. Gambar tersebut lebih sering ditanggapi sebagai makanan oleh kelompok mahasiswa yang lapar daripada oleh kelompok mahasiswa yang kenyang. Persepsi yang berbeda ini tidak disebabkan oleh stimulus, karena gambar yang disajikan sama pada kedua kelompok. Jelas perbedaan itu bermula pada kondisi biologis mahasiswa.

Bruner dan Goodman menyuruh kedua kelompok anak untuk mengukur besaran bermacam-macam uang recehan. Kelompok anak-anak yang miskin cenderung memberikan ukuran yang lebih besar daripada kelompok anak-anak kaya. Ini menunjukan bahwa nilai-nilai social suatu objek bergantung pada kelompok social orang yang menilai.

Dari sini, Krech dan Crutchfield merumuskan dalil persepsi yang pertama. Persepsi bersifat selektif secara fungsional. Dalil ini bahwa objek-objek yang mendapat tekanan dalam persepsi kita biasanya objek-objek yang memenuhi tujuan individu yang melakukan persepsi. Mereka memberikan contoh pengaruh kebutuhan, kesiapan mental, suasana emosional, dan latar belakang budaya terhadap persepsi. Bila orang lapar dan orang haus duduk di restoran, yang pertama akan melihat nasi dan daging, yang kedua akan melihat limun atau Coca Cola. Kebutuhan biologis yang menyebabkan persepsi yang berbeda.

Murray melakukan eksperimen untuk mengetahui bagaimana suasana mental mempengaruhi persepsi. Sekelompok anak-anak disuruh menceritakan gambar seorang laki-laki sebelum dan sesudah bermain “perang-perangan”. Sesudah perang-perangan, anak-anak cenderung lebih banyak melihat kekejaman pada wajah orang dalam gambar itu. Peneliti yang lain Leuba dan Lucas, mengungkapkan pengaruh suasana emosional terhadap persepsi. Secara hipnotis diciptakan tiga macam suasana emosional: suasana bahagia, suasana kritis, dan suasana gelisah. Kepada subjek diperlihatkan gambar “empat mahasiswa sedang berbaring menjemur diri sambil mengetik dan mendengarkan radio”. Pada suasana bahagia, gambar itu dilukiskan sebagai “suasana santai, tidak ada pekerjaan, hanya duduk, mendengar, dan santai, tidak banyak yang dipikirkan”. Dalam suasana kritis, subjek memberi komentar sebagai berikut, “Ini orang yang sedang merusakkan celananya yang baik dengan caraberbaring seperti itu. Sia-sia saja mereka berusaha belajar”. Dalam suasana gelisah ia menjelaskan gambar itu sebagai berikut, “Mereka sedang mendengarkan pertandingan sepak bola. Tampaknya pertandingan itu cukup seru, seorang diantaranya kelihatan seakan-akan tim yang dijagokannya kalah”.

Faktor-faktor fungsional yang mempengaruhi persepsi lazim disebut sebagai kerangka rujukan. Mula-mula konsep ini berasal dari penelitian psikofisik yang berkaitan dengan persepsi objek. Para psikolog sosial menerapkan konsep ini untuk menjelaskan persepsi sosial. Dalam eksperimen psikofisik, Wever dan Zener menunjukkan bahwa penilaian terhadap objek dalam hal beratnya bergantung pada rangkaian objek yang dinilainya. Dalam rangkaian objek-objek yang berat, objek yang nilainya seberat 92 gram dinilai ringan, sedangkan dalam rangkaian benda-benda ringan, objek yang sama dikatakan berat. Bila dilanjutkan pada persepsi sosial, kita akan melihat bahwa besar-kecilnya pendapatan dinilai dalam kerangka rujukan penilaiannya. Buat orang yang terbiasa mendapat gaji 500 ribu rupiah, keuntungan 100 ribu rupiah tidaklah begitu menggembirakan. Buat orang yang menganggur, jumlah yang sama merupakan keuntungan yang luar biasa.

Dalam kegiatan komunikasi, kerangka rujukan mempengaruhi bagaimana orang memberi makna pada pesan yang diterimanya. Berbicara tentang *fluor albus, adnexitis, dysmenorhhae,* atau kanker cerviks dimuka ahli komunikasi, tidak akan menimbulkan pengertian apa-apa. Mereka tidak memiliki kerangka rujukan untuk memahami istilah-istilah kedokteran tersebut. Begitu pula mahasiswa kedokteran akan sukar memahami pembicaraan tentang teori-teori komunikasi, bila mereka tidak memiliki latar belakang pendidikan dalam ilmu komunikasi.

Menurut McDavid dan Hariri (1968: 140), para psikolog menganggap konsep kerangka rujukan ini amat berguna untuk menganalisis interpretasi perseptual dari peristiwa yang dialami.

1. Faktor stuktural

Faktor-faktor struktural berasal semata-mata dari sifat stimulus fisik dan efek-efek saraf yang ditimbulkannya pada sistem saraf individu. Para psikolog Gestalt, seperti Kohler, Wartheimer (1959), dan Koffka, merumuskan prinsip-prinsip persepsi yang bersifat struktural. Prinsip-prinsip ini kemudian dikenal dengan teori Gestalt. Menurut teori Gestalt, bila kita mempersepsi sesuatu, kita mempersepsikannya sebagai suatu keseluruhan. Kita tidak melihat bagian-bagiannya, lalu menghimpunnya.

Dengan kata lain, bagian-bagian medan yang terpisah (dari medan persepsi), dan karena itu dinamika khusus dalam interaksi ini menentukan distribusi fakta dan kualitas lokalnya. Mungkin masih agak sukar dicerna. Maksud Kohler jika kita ingin memahami suatu peristiwa, kita tidak dapat meneliti fakta-fakta yang terpisah, kita harus memandangnya dalam hubungan keseluruhan. Untuk memahami seseorang, kita harus melihatnya dalam konteksnya, dalam lingkungannya, dalam masalah yang dihadapinya.

Dari prinsip ini, Krech dan Crutchfield melahirkan dalil persepsi yang kedua: Medan perseptual dan kognitif selalu diorganisasikan dan diberi arti. Kita mengorganisasikan stimulus dan melihat konteksnya. Walaupun stimulus yang kita terima itu tidak lengkap, kita akan mengisinya dengan interprestasi yang konsisten dengan rangkaian stimulus yang kita persepsi. Salomon Asch (1959) melakukan beberapa eksperimen tentang persepsi orang pada serangkaian kata-kata sifat. Dua kelompok penanggap disuruh memberikan ulasan, kelompok pertama pada rangkaian A dan kedua pada B.

1. Cedas-rajin-impulsif-kritis-kepala batu-iri
2. Iri-kepala batu-kritis-impulsif-rajin-cerdas

Kata-kata pada setiap rangkaian sama, tetapi urutan dirubah. A dimulai pada sifat positif, B pada sifat negatif. Ternyata komentar orang berbeda, A dianggap sebagai orang yang memiliki kemampuan, tetapi mempunyai kelemahan yang tidak begitu merusak. B dianggap sebagai orang yang “rusak”, yang kemampuannya tertutup oleh kelemahan yang gawat. Ini menunjukan bagaimana konteks menentukan makna. Tanpa eksperimen ilmiah sekalipun, kita segera merasa sampai pada “gadis yang cantik, walaupun tidak setia”, daripada “gadis yang tidak setia, walaupun cantik”. Bila anda mengatakan “Kawin itu berat tetapi bahagia”, anda pasti memilih kawin. Namun, bila anda berkata “Kawin itu bahagia tetapi berat”, anda tampaknya belum mau kawin.

Dalam hubungan dengan konteks, Krech dan Crutchfield menyebutkan dalil persepsi yang ketiga: Sifat-sifat perseptual dan kognitif dari substruktur ditentukan pada umumnya oleh sifat-sifat struktur secara keseluruhan. Menurut dalil ini, jika individu dianggap sebagai anggota kelompok, semua sifat individu yang berkaitan dengan sifat kelompok akan dipengaruhi oleh keanggotaan kelompoknya, dengan efek yang berupa asimilasi atau kontras.

Misalnya, jika Bejo yang terkenal sebagai tokoh gali berpakaian jelek, anda akan menilainya pakaiannya kusut dan kotor. Jika pakaian yang sama dikenakan oleh Udin, kiai yang miskin, anda akan mengomentarinya sebagai pakaian yang, walaupun lusuh tetapi ditambah dengan rapi dan bersih. Di sini, terjadi asimilasi. Sifat-sifat kelompok menonjolkan atau melemahkan sifat individu. Sebagai contoh lain jika si Yeni ratu kecantikan, ditemukan dengan rambut yang belum disisir, anda akan menganggapnya tetap cantik, walaupun rambutnya tidak disisir rapi. Namun jika si Kemong ratu kejelekan (misalnya, ada kontes kejelekan), didapat berambut kusut, anda akan segera memberi komentar jelek sekali, apalagi rambutnya berantakan. Lihat bagaimana walaupun digeser oleh apalagi.

Karena manusia selalu memandang stimulus dalam konteksnya, dalam strukturnya ia pun akan mencoba mencari struktur pada rangkaian stimuli. Struktur ini diperoleh dengan jalan mengelompokkan berdasarkan kedekatan atau persamaan. Prinsip kedekatan menyatakan bahwa stimulus yang berdekatan satu sama lain akan dianggap satu kelompok.

Dari prinsip ini, Krech dan Crutchfield menyebutkan dalil persepsi yang keempat: Objek atau peristiwa yang berdekatan dalam ruang dan waktu atau menyerupai satu sama lain, cenderung ditanggapi sebagai bagian dari struktur yang sama.

Dalil ini umumnya betul-betul bersifat struktural dalam mengelompokkan objek-objek fisik, seperti titik, garis, atau balok. Kita segera menganggap bentuk-bentuk segitiga sebagai salah satu kelompok, dan titik-titik sebagai kelompok yang lain. Kita dapat meramalkan dengan cermat, dengan mengukur jarak diantara objek atau melihat kesamaan bentuk, benda-benda mana yang akan dikelompokkan.

Pada persepsi sosial, pengelompokan tidak murni sruktural sebab apa yang dianggap sama atau berdekatan oleh seorang individu, tidaklah dianggap sama atau berdekatan oleh individu yang lain. Disini, masuk jugalah peranan kerangka rujukan. Ahli zoologi menganggap kuda, manusia, dan ikan paus sebagai satu kelompok yang berlainan, kuda hewan darat, ikan paus hewan laut, manusia tentu bukan hewan.

Kebudayaan juga berperan dalam melihat kesamaan. Pada masyarakat yang menitikberatkan kekayaan, orang akan membagi masyarakat pada dua kelompok: orang kaya dan orang miskin. Pada masyarakat yang mengutamakan pendidikan, orang mengenal dua kelompok: kelompok terdidik dan tidak terdidik. Pengelompokan kultural erat laitannya dengan label, dan yang kita beri label yang sama cenderung dipersepsi sama. Dengan label pribumi dan nonpribumi, kita mengorganisasikan Cina, India, Arab, Jepang pada kelompok yang sama. Dengan label ekstrem, pemerintah dapat memasukkan siapa saja yang menentang atau mempersoalkan Pancasila.

Dalam komunikasi, dalil kesamaan dan kedekatan ini sering dipakai oleh komunikator untuk meningkatkan kredibilitasnya. Ia menghubungkan dirinya atau mengakrabkannya dirinya dengan orang-orang yang mempunyai prestise tinggi. Terjadilah apa yang disebut *gilt by association* (cemerlang karena hubungan). Orang menjadi terhormat karena duduk berdampingan dengan anggota cabinet atau bersalaman dengan presiden. Sebaliknya, kredibilitas berkurang karena berdampingan dengan orang yang nilai kredibilitasnya rendah pula. Disini terjadi apa yang disebut *guilt by association* (bersalah karena hubungan).

Jadi, kedekatan ruang dan waktu menyebabkan stimulus ditanggapi sebagai bagian dari struktur yang sama. Sering terjadi hal-hal yang berdekatan juga dianggap berkaitan atau mempunyai hubungan sebab dan akibat. Bila setelah terjadi kematian seorang tokoh, turun hujan lebat, kita cenderung menganggap hujan lebat dilibatkan oleh matinya sang tokoh. Bila pada saat kesulitan ekonomi anda memegang pemerintahan, orang akan mengaitkan kegagalan ekonomi itu pada kebijaksanaan anda. Bila setelah saya menjadi pemimpin bantuan dating, orang akan menghubungkan bantuan itu pada pengangkatan saya menjadi pimpinan. Dalam logika, kecenderungan ini dianggap sebagai salah satu keracunan berpikir, *post hoc ergo proter hoc*, sesudah itu dengan demikian karena itu.

 Menurut Krech dan Crutchfield, kecenderungan untuk mengelompokan stimulus berdasarkan kesamaan dan kedekatan adalah hal yang universal. *It is not something that only the poor logicians can do,* ujar mereka. Kita semua sering atau pernah melakukannya.

 Menurut Krech dan Crutchfield ( Rakhmat 2012:55 ) ada empat dalil utama yang menuturkan persepsi diantaranya :

1. Persepsi bersifat selektif secara fungsional, dalil ini berarti bahwa objek-objek yang medapat tekanan dalam persepsi kita biasanya objek-objek yang memenuhi tujuan individu yang melakukan persepsi. Mereka memberikan contoh pengaruh kebutuhan, kesiapan mental, suasana emosional, dan latar belakang budaya terhadap persepsi.
2. Medan perseptual dan kognitif selalu diorganisir dan diberi arti. Kita mengorganisasikan stimulus dengan melihatkonteksnya. Walaupun stimulus yang kita terima itu tidak lengkap, kita akan mengisinya dengan interpetasi yang konsisten dengan rangkaian stimulus yang kita persepsi.
3. Sifat-sifat perseptual dan kognitif dari substruktur ditentukan pada umumnya oleh sifat-sifat struktur secara keseluruhan. Jika individu dianggap sebagai kelompok, semua sifat individu yang berkaitan dengan sifat kelompok akan dipengaruhi oleh keanggotaan kelompoknya, dengan efek yang berupa asimilasi atau kontras.
4. Objek atau peristiwa yang berdekatan dalam ruang dan waktu atau menyerupai satu sama lain, cenderung ditanggapi sebagai bagian dari struktur yang sama.

 Berdasarkan kutipan diatas ada empat dalil utama yang sangat mempengaruhi persepsi. Tentunya ke empat dalil tersebut mempengaruhi kualitas seseorang dalam mempersepsi berbagai hal yang ada di lingkungannya.

**D. Pengrajin Rajut**

**1. Pengertian Pengrajin**

[Pengrajin](http://kateglo.bahtera.org/?mod=dictionary&phrase=pengrajin) ialah orang yang pekerjaannya membuat barang-barang kerajinan atau orang yang mempunyai keterampilan berkaitan dengan kerajinan tertentu, seperti kelompok penenun songket Palembang dapat disebut pengrajin songket dari Palembang. Barang-barang tersebut dibuat dengan mesin, tetapi dengan tangan sehingga sering disebut barang kerajinan tangan.

Dari segi makna, kata pengrajin tidak berhubungan dengan kata rajin, melainkan lebih berkaitan dengan kata kerajinan tangan. Munculnya alomorf peng- dapat dipastikan berkaitan dengan kata kerajinan yang diawali dengan konsonan k. Terlepas dari itu, bentuk pengrajin kiranya perlu dipertahankan dan tidak perlu diganti dengan perajin karena kedua kata bentukan itu menyatakan makna sendiri-sendiri.

Kerajinan adalah hal yang berkaitan dengan buatan [tangan](http://id.wikipedia.org/wiki/Tangan) atau kegiatan yang berkaitan dengan barang yang dihasilkan melalui keterampilan tangan (kerajinan tangan). Kerajinan yang dibuat biasanya terbuat dari berbagai bahan. Dari kerajinan ini menghasilkan hiasan atau benda seni maupun barang pakai. Biasanya istilah ini diterapkan untuk cara tradisional dalam membuat barang-barang. Arti yang lain ialah usaha yang berterusan penuh semangat ketekunan, kecekalan, kegigihan, dedikasi dan berdaya maju dalam melakukan sesuatu perkara.

Kerajinan tangan bisa disebut juga suatu kegiatan dalam menciptakan suatu bentuk produk yang dominan menggunakan tangan manusia, yang sangat minim dalam penggunaan mesin atau alat otomatis. Hal yang lumrah dalam pembuatan kerajinan tangan adalah mengangkat suatu nilai dari bahan atau barang yang tidak layak pakai (barang bekas), sehingga memiliki fungsi untuk kehidupan dan tentunya bernilai ekonomis.

Dalam Kerajinan Tangan, kapasitas produksi terukur dari jumlah orang yang terlibat didalamnya. Selain itu adanya pengaruh ketersedaan bahan baku utama dan pendukung, karena bahan bekas ketersediannya tidak bisa diprediksi, kecuali dalam pembuatan kerajinan tangan tersebut menggunakan lebih banyak bahan baru. Bahan yang biasa digunakan untuk kerajinan tangan adalah bahan baru yang bisa kita beli di toko juga menggunakan barang bekas layak pakai, serta bahan yang melalui pendaurulangan.

Dalam membuat kerajinan tangan tentunya dibutuhkan jiwa seni dan kreatifitas yang tinggi. Pemahaman terhadap peluang usaha ini tidaklah mudah, tetapi juga bukanlah hal yang rumit. Kuncinya kita harus memiliki kemauan yang tinggi dan bersungguh-sungguh.

Mengubah barang bekas menjadi barang yang berguna merupakan peluang yang sangat besar. Saat ini bisa kita lihat bermunculan pengusaha barang bekas yang tentunya bisa mendatangkan uang yang sangat banyak. Apalagi dengan sentuhan kreatifitas pastinya akan menciptakan nilai yang jauh lebih besar lagi. Semoga saja nantinya lebih banyak generasi muda kreatif yang mampu menyulap barang bekas menjadi suatu produk yang memiliki nilai yang tinggi melalui usaha kerajinan tangan. Potensi ini selain mendatangkan income secara pribadi tetapi akan mampu menghidupi orang banyak yang terlibat didalamnya, juga akan mampu mengangkat potensi pariwisata Indonesia.

Dari kutipan di atas menjelaskan bahwa pengrajin adalah orang yang pekerjaannya membuat kerajinan tangan. Kerajinan tangan tersebut ada yang dibuat oleh tangan sendiri dan adapula yang dihasilkan oleh mesin-mesin. Hasil dari kerajinan tersebut merupakan berbagai macam jenis, diantaranya pakaian. Dari kegiatan pengrajin tersebut merupakan peluang usaha untuk mengurangi angka pengangguran di Indonesia yang setiap tahunnya terus meningkat.

**2. Pengertian Rajut**

Berbicara tentang kerajinan memang tidak akan pernah ada habisnya. Hampir setiap hari muncul ide kreasi baru dari para pengrajin, dengan berbagai bentuk dan bahan yang digunakan. Dari mulai bahan yang murah dan mudah didapatkan hingga bahan yang tergolong mahal pun dapat dikreasikan menjadi [kerajinan](http://bisnisukm.com/bersahabat-dengan-alam-dan-ciptakan-peluang-bisnis-yang-ramah-lingkungan.html) baru yang menarik. Salah satu kerajinan yang menggunakan bahan murah dan mudah ditemukan di sekitar kita adalah [kerajinan](http://bisnisukm.com/kerajianan-tas-lidi-yang-menawan-hati.html) rajut. Kerajinan ini hanya membutuhkan ketrampilan, benang rajut serta jarum rajut yang biasa disebut hakken.

Kerajinan rajut biasanya digemari oleh para [wanita](http://bisnisukm.com/salon-muslimah-makin-berkembang.html), khususnya para ibu – ibu. Padahal sebenarnya menurut sejarahnya, budaya kerajinan rajut pada awalnya dilakukan oleh para pria di Timur Tengah ( tepatnya dari Jazirah Arab ). Namun kerajinan rajut yang ada di Indonesia dikenalkan oleh orang – orang Belanda, karena kerajinan rajut tersebar lebih dulu ke kawasan Eropa sebelum masuk ke Asia. Di Negara Indonesia, kerajinan ini banyak diminati kaum wanita. Maka tak heran jika kini banyak wanita yang telah sukses membuka [usaha](http://bisnisukm.com/usaha-rental-komputer-di-lingkungan-mahasiswa.html) kerajinan rajut, hanya bermula dari hoby mereka.

Merajut dalam [bahasa Inggris](http://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa_Inggris) adalah *knitting* yaitu metode membuat [kain](http://id.wikipedia.org/wiki/Tekstil), [pakaian](http://id.wikipedia.org/wiki/Pakaian) atau perlengkapan busana dari [benang rajut](http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Benang_rajut&action=edit&redlink=1). Berbeda dari [menenun](http://id.wikipedia.org/wiki/Menenun) yang menyilangkan dua jajaran benang yang saling tegak lurus, merajut hanya menggunakan sehelai benang. Sebaris tusukan yang sudah selesai dipegang di salah satu [jarum rajut](http://id.wikipedia.org/wiki/Jarum_rajut) sampai dimulainya tusukan yang baru.

Merajut dapat dilakukan dengan tangan atau dengan mesin. Ada berbagai jenis gaya dan teknik merajut. Teknik dasar dalam merajut adalah tusuk atas dan tusuk bawah. Tusuk atas adalah mengait benang dari arah depan, sementara tusuk bawah adalah mengait benang dari arah belakang. Hasil rajutan memiliki pola seperti huruf v yang bersambungan.

Perajutan datar yang dilakukan memakai dua jarum rajut atau jarum melingkar. Hasilnya berupa kain lurus dan mendatar ([persegi panjang](http://id.wikipedia.org/wiki/Persegi_panjang)). Perajutan melingkar yang dilakukan memakai jarum rajut berujung dua atau jarum melingkar. Hasilnya berupa kain berbentuk silinder seperti [kaus kaki](http://id.wikipedia.org/wiki/Kaus_kaki) dan lengan [baju hangat](http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Baju_hangat&action=edit&redlink=1).

Definisi di atas rajut merupakan hasil dari keterampilan atau kerajinan tangan yang dibuat oleh manusia, adapun yang dibuat oleh mesin rajut. Ada berbagai jenis hasil dari kerajinan rajut ini diantaranya baju hangat, kaus kaki, baju, dll. Konsumen dari kerajinan rajut ini lebih banyak dari kaum wanita, khususnya para ibu-ibu.

**E. Pemberdayaan**

**1. Pengertian Pemberdayaan**

Pemberdayaan berasal dari bahasa inggris *“empowerment”*, yang secara harfiah bisa diartikan sebagai “pemberkuasaan”, dalam arti pemberian atau peningkatan “kekuasaan” *(power)* kepada masyarakat yang lemah atau tidak beruntung *(disadvantaged)*. *Empowerment aims to increase the power of disadvantaged*, demikian menurut Jim Ife seperti dikutip Suharto (1997:214) dalam Huraerah. Sementara Swift dan Levin mengatakan pemberdayaan menunjuk pada usaha *“realocation of power”* melalui pengubahan struktur sosial (Suharto, 1997:214). Sedangkan Rappaport mengungkapkan pemberdayaan adalah suatu cara dengan mana rakyat mampu menguasai (berkuasa atas) kehidupannya (Suharto, 1997:215). Selanjutnya Craig dan Mayo (1995:50) dalam Huraerah mengatakan bahwa konsep pemberdayaan termasuk dalam pengembangan masyarakat dan terkait dengan konsep-konsep: kemandirian *(self-help),* partisipasi *(participation),* jaringan kerja *(networking),* dan pemerataan *(equity)*.

Soetarso (2003) menjelaskan dalam Huraerah (2008: 96) bahwa pemberdayaan pada hakikatnya mempunyai dua pengertian yang saling berkaitan, yaitu:

1. Peningkatan kemampuan, motivasi dan peran semua umur masyarakat agar dapat menjadi sumber yang langgeng untuk mendukung semua bentuk usaha kesejahteraan sosial. Unsur masyarakat yang dapat menjadi sumber ini antara lain adalah:
2. Semua warga masyarakat yang selama ini telah aktif mengabdikan diri di bidang usaha kesejahteraan sosial, baik secara perseorangan maupun dalam kelompok atau organisasi (PSM, relawan, sosial, anggota Orsos/LSM, perkumpulan profesi, dunia usaha, universitas, media masa, pemuka masyarakat dan agama, termasuk penyandang masalah dan eks-penyandang masalah),
3. Semua warga masyarakat, baik perseorangan maupun dalam kelompok dan organisasi seperti di atas, yang karena alasan tertentu, tidak atau belum aktif mengabdikan diri di bidang usaha kesejahteraan sosial. Warga masyarakat tidak atau belum aktif dalam usaha kesejahteraan sosial karena satu atau lebih alasan berikut ini:

(a). Tidak mengerti tentang masalah sosial dan pengaruhnya di dalam masyarakat,

(b). Tidak mengerti tentang usaha kesejahteraan sosial, masalah sosial, dan pengaruhnya serta mengerti tentang usaha kesejahteraan sosial, tetapi tidak mengetahui di mana dan bagaimana cara memberikan bantuan,

(c). Pernah membantu tetapi kecewa atau dikecewakan (tidak ada yang membimbing, hanya menjadi sapi perah di bidang keuangan, atau bantuannya dikorupsi).

b. Pemanfaatan Sumber Masyarakat yang lebih ditingkatkan kemampuan, motivasi dan perannya. Lebih lanjut Soetarso (2003) mengungkapkan bahwa peningkatan kemampuan, motivasi, dan peran masyarakat berkaitran dengan:

1. Pemahaman Lingkungan

Setiap pemberdayaan masyarakat harus memahami karakteristik pemilik sumber di lingkungan masing-masing, kondisi lingkungan sosial dan budaya di lingkungan tersebut. Informasi tentang hal-hal ini akan membantu pemberdayaan dalam penentuan orang-orang yang akan dilibatkan, kendala dan peluang guna pelaksanaan upaya pemanfaatan sumber serta cara-cara yang perlu dilakukan yang dapat diterima oleh semua pihak. Informasi ini dapat diperoleh melalui observasi lingkungan secara langsung dan penggunaan pihak ketiga informan (kawan, rekan sekerja, pemuka masyarakat dan agama, pekerja organisasi lain, klien, dll).

2. Pemberian Informasi

Informasi merupakan faktor paling lemah dalam usaha kesejahteraan sosial informasi yang perlu disampaikan kepada masyarakat secara terus-menerus adalah yang berkaitan dengan masalah sosial dan pengaruh negatifnya, usaha-usaha kesejahteraan sosial yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut.

Walaupun informasi dapat dilakukan melalui berbagai bentuk media masa baik elektronik maupun cetak, maupun informasi langsung wawancara melalui pertemuan-pertemuan pada tingkat lokal (RT, RW, Kelurahan) akan sangat efektif dalam hubungannya dengan pemberdayaan.

1. Dramatisasi Masalah

Berbagai masalah dalam lingkup usaha kesejahteraan sosial (kemiskinan, ketelantaran anak dan manula, kecacatan, narkoba, tawuran, dll), terutama yang benar-benar terjadi pada tingkat local perlu didramatisasi sedemikian rupa sehingga menyentuh perhatian masyarakat setempat, khususnya pemilik sumber.

1. Penggalangan Dukungan

Untuk mengatasi hambatan yang mungkin dihadapi, pemberdayaan harus menggalang hubungan dari berbagai dukungan dari berbagai pihak, termasuk sumber yang akan diberdayakan dan dimanfaatkannya. Dukungan dapat diperoleh dari melalui pelayanan sosial yang telah ada di dalam masyarakat, melalui aneka bentuk penyuluhan sosial, atau melalui kontak dengan individu.

1. Pengembangan Momentum

Pemberdayaan masyarakat akan melemah kalau pemberdayaan tidak mampu mempertahankan atau mengembangkan hasil yang telah dicapainya. Respon pemilik sumber harus tetap ditingkatkan melalui demonstrasi hasil nyata dukungan partisipasi dan pemanfaatan sumber-sumbernya.

1. Penyediaan Tempat atau Lahan Pengabdian

Untuk mendukung cara-cara yang telah diuraikan, diperlukan lahan pengabdian nyata, misalnya daerah kumuh, kantong kemiskinan, panti sosial, bentuk-bentuk kecacatan tertentu, dll. Lahan pengabdian ini memungkinkan untuk para calon pengabdi untuk melihat sendiri dan memperoleh penjelasan tangan pertama untuk menjelaskan tentang bentuk-bentuk masalah sosial dan upaya untuk memecahkannya.

1. Pelatihan dan Pengembangan

Pelatihan dan pengembangan (seminar, lokakarya, kunjungan banding) bagi para pengabdi usaha kesejahteraan sosial sebaiknya tidak dilakukan sebelum pengabdian seperti selalu dilakukan selama ini, tetapi sesudah pengabdian. Pelatihan tidak ditentukan oleh penanggungjawab usaha kesejahteraan sosial (Depsos, Dinas Sosial), tetapi berdasarkan kebutuhan dan permintaan pengabdi.

Menurut Ife seperti dikutip Suharto (2005: 59) dalam Huraerah, pemberdayaan memuat dua pengertian kunci, yakni kekuasaan dan kelompok lemah. Kekuassan disini diartikan bukan hanya menyangkut kekuasaan politik dalam arti sempit, melainkan kekuasaan atau penguasaan klien atas :

1. Pilihan-pilihan personal dan kesempatan-kesempatan hidup,
2. Pendefinisian kebutuhan,
3. Lembaga-lembaga,
4. Ide atau gagasan,
5. Sumber-sumber,
6. Aktivitas ekonomi,
7. Reproduksi.

Berdasarkan kutipan diatas maka pemberdayaan merupakan suatu kegiatan untuk memperkuat kekuasaan, kekuasaan disini dapat diartikan sebagai peningkatan kemampuan, motivasi, dan peran semua umur masyarakat agar dapat menjadi sumber yang langgeng untuk mendukung semua bentuk usaha kesejahteraan sosial. Pemberdayaan juga lebih meningkatkan masyarakat dalam pemanfaatan sumber daya sehingga dapat ditingkatkan kemampuan dan perannya sebagai masyarakat.

1. **Pemberdayaan sebagai proses**

Tujuan dasar pemberdayaan adalah keadilan sosial dengan memberikan ketentraman kepada masyarakat yang lebih besar serta persamaan politik dan sosial melalui upaya saling membantu dan belajar melalui pengembangan langkah-langkah kecil guna tercapainya tujuan yang lebih besar, demikian Payne menulis dalam buku *Modern Social Theory* (1997: 268).

Namun demikian, untuk memberdayakan masyarakat memerlukan rangkaian proses yang panjang (tidak seketika atau tidak langsung jadi), agar mereka menjadi lebih berdaya. Suzanne Kinder Vetter seperti dikutip Saraswati (1997: 79) dalam Huraerah mengatakan bahwa *“people gaining an understanding of and controlle over social economic and or political forces in order to improve their standing in society:*

Proses pemberdayaan cenderung dikaitkan sebagai unsur pendorong *(driving’s force)* sosial-ekonomi dan politik. Pemberdayaan adalah suatu upaya dan proses bagaimana agar berfungsi sebagai “power” *(driving’s force)* dalam pencapaian tujuan yaitu pengembangan diri *(self-development).* Secara konseptual, pemberdayaan harus mencangkup enam hal sebagai berikut:

1. *Learning by doing.* Artinya, pemberdayaan adalah sebagai proses hal belajar dan ada suatu tindakan-tindakan konkrit yang terus-menerus.
2. *Problem solving.* Pemberdayaan harus memberikan arti terjadinya pemecahan masalah yang dirasakan krusial dengan cara dan waktu yang tepat.
3. *Self-evaluation.* Yaitu bahwa pemberdayaan harus mampu mendorong seseorang atau kelompok tersebut untuk melakukan evaluasi secara mandiri.
4. *Self-development and coordination.* Artinya mendorong agar mampu melakukan pengembangan diri dan melakukan hubungan koordinasi dengan pihak lain secara lebih luas.
5. *Self-selection.* Suatu kumpulan yang tumbuh sebagai upaya pemilihan dan penilaian secara mandiri dalam menetapkan langkah-langkah ke depan.
6. *Self-decisim.* Dalam memilih tindakan yang tepat hendaknya memiliki kepercayaan diri *(self-confidence)* dalam memutuskan sesuatu secara mandiri *(self-decisim)* (Saraswati, 1997: 79-80).

Keenam unsur tersebut merupakan pembiasaan untuk berdaya, sebagai penguat dan pengait pemberdayaan jika dilakukan secara kontinyu maka pengaruh yang ditimbulkan semakin lama semakin kuat dan apabila telah kuat diharapkan dapat terjadi proses menggelinding dengan sendirinya *(snow ball).*

Menurut Sunyoto Usman, pemberdayaan adalah sebuah proses dalam bingkai usaha memperkuat apa yang lazim disebut *community self-reliance* atau kemandirian. Dalam proses ini masyarakat didampingi untuk membuat analisis masalah yang dihadapi, dibantu untuk menemukan alternatif solusi masalah tersebut, serta diperlihatkan strategi memanfaatkan berbagai *resources* yabg dimiliki dan dikuasai. Dalam proses itu, masyarakat dibantu bagaimana merancang sebuah kegiatan sesuai dengan kemampuan yang dimiliki, bagaimana mengimplementasikan rancangan tersebut, serta bagaimana membangun strategi memperoleh sumber-sumber eksternal yang dibutuhkan sehingga memperoleh hasil yang optimal. Dengan kata lain, prinsip yang dikedepankan dalam proses pemberdayaan adalah memberi peluang masyarakat untuk memutuskan apa yang mereka inginkan sesuai dengan kemampuan, pengetahuan, dan kemampuannya sendiri (Jamasy, 2004: xiii-xiv).

Dalam pandangan Kartasasmita (1997: 11-12) memberdayakan adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Dengan kata lain, memberdayakan adalah memampukan dan memandirikan masyarakat. Dalam kerangka pemikiran itu, upaya memberdayakan masyarakat haruslah dilakukan dengan:

1. Menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang.
2. Upaya itu harus diikuti dengan memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oles masyarakat.
3. Pemberdayaan bukan hanya meliputi penguatan individu anggota masyarakat, tetapi juga prantara-prantaranya.
4. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan.
5. Memberdayakan juga meliputi arti melindungi. Dalam proses pemberdayaan, harus dicegah yang lemah menjadi bertambah lemah, oleh karena kekurangberdayaan dalam menghadapi yang kuat.

Azis (2005: 135) dalam Huraerah merinci tahapan-tahapan yang seharusnya dilalui dalam melakukan pemberdayaan. *Pertama,* membantu masyarakat dalam menemukan masalahnya. *Kedua,* melakukan analisis (kajian) terhadap masalah tersebut secara mandiri (partisipatif). Kegiatan ini biasanya dilakukan dengan cara curah pendapat, membentuk kelompok-kelompok diskusi, dan mengadakan pertemuan warga secara periodic (terus-menerus). *Ketiga,* menentukan skala prioritas masalah, dalam arti memilah dan memilih tiap masalah yang paling mendesak untuk diselesaikan. *Keempat,* mencari penyelesaian masalah yang dihadapi, antara lain dengan pendekatan sosio-kultural yang ada dalam masyarakat. *Kelima,* melaksanakan tindakan nyata untuk menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi. *Keenam,* mengevaluasi seluruh rangkaian dan proses pemberdayaan itu untuk dinilai sejauh mana keberhasilan dan kegagalannya.

Proses pemberdayaan dapat dilakukan yang dapat disingkat menjadi 5P, yaitu: Pemungkinan, Penguatan, Perlindungan, Penyokongan, dan Pemeliharaan (Suharto, 1997: 218-219) dalam Huraerah:

1. Pemungkinan: menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang secara optimal.
2. Penguatan: memperkuat pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki masyarakat dalam memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhan-kebutuhannya.
3. Perlindungan: melindungi masyarakat terutama kelompok lemah agar tidak tertindas kelompok kuat, menghindari persaingan yang tidak seimbang.
4. Penyokongan: memberikan bimbingan dan dukungan agar masyarakat mampu menjalankan peranan dan tugas-tugas kehidupannya.
5. Pemeliharaan: memelihara kondisi yang kondusif agar tetap terjadi keseimbangan distribusi kekuasaan antara berbagai kelompok dalam masyarakat.

Berdasarkan kutipan diatas maka pemberdayaan sebagai proses dapat diartikan atau dapat disingkat menjadi istilah 5P, yaitu: pemungkinan, penguatan, perlindungan, penyokongan, dan pemeliharaan. Dengan adanya proses tahapan-tahapan dari pemberdayaan maka akan mengevaluasi seluruh rangkaian pemberdayaan itu untuk dinilai sejauh mana keberhasilan dan kegagalannya.

1. **Tingkatan Pemberdayaan**

Sudah saatnya paradigma pembangunan yang selalu menempatkan pemerintah sebagai sumber segala-galanya digeser dengan menempatkan masyarakat sebagai pemain utama. Kekuasaan sejatinya dikembalikan kepada masyarakat, agar masyarakat menjadi aktor utama dalam pembangunan. Sebuah proses seharusnya dilakukan untuk meningkatan derajat keberdayaan masyarakat sampai kepada tingkat keberdayaan masyarakat yang optimal.

Secara bertingkat, keberdayaan masyarakat menurut Susiladiharti (2002) dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Tingkat keberdayaan pertama adalah terpenuhinya kebutuhan dasar *(basic needs).*
2. Tingkat keberdayaan kedua adalah penguasaan dan akses terhadap berbagai sistem dan sumber yang diperlukan.
3. Tingkatan keberdayaan ketiga adalah dimilikinya kesadaran penuh akan berbagai potensi, kekuatan dan kelemahan diri dan lingkungannya.
4. Tingkat keberdayaan keempat adalah kemampuan berpartisipasi secara aktif dalam berbagai kegiatan yang bermanfaat bagi lingkungan yang lebih luas.
5. Tingkat keberdayaan kelima adalah kemampuan untuk mengendalikan diri dan lingkungannya. Timgkatan kelima ini dapat dilihat dari keikutsertaan dan dinamika masyarakat dalam mengevaluasi dan mengendalikan berbagai program dan kebijakan institusi dan pemerintahaan.

Untuk mewujudkan derajat keberdayaan masyarakat tersebut, perlu dilakukan langkah-langkah secara runtun dan simultan, antara lain: (1) meningkatkan suplai kebutuhan-kebutuhan bagi kelompok masyarakat yang paling tidak berdaya (miskin), (2) upaya penyadaran untuk memahami diri: potensi, kekuatan, dan kelemahan, serta memahami lingkungannya, (3) pembentukan dan penguatan institusi, terutama institusi di tingkat lokal, (4) upaya penguatan kebijakan, dan (5) pembentukan dan pengembangan jaringan usaha/kerja.

Berdasarkan kutipan diatas bahwa tingkatan pemberdayaan bermacam-macam, Sebuah proses seharusnya dilakukan untuk meningkatan derajat keberdayaan masyarakat sampai kepada tingkat keberdayaan masyarakat yang optimal. Sehingga untuk mewujudkan derajat keberdayaan masyarakat perlu untuk dilakukan langkah-langkah secara runtun dan simultan.

1. **Bias-bias Pemberdayaan**

Pemberdayaan sebagai sebuah strategi, sekarang telah banyak diterima, bahkan telah berkembang dalam berbagai literatur di dunia barat. KTT pembangunan Sosial di Kopenhagen tahun 1992 juga telah memuatnya dalam berbagai kesepakatannya. Namun, upaya mewujudkannya dalam praktik pembangunan tidak selalu berjalan mulus.

Banyak pemikir dan praktisi yang belum memahami dan memungkinkan tidak meyakini bahwa konsep pemberdayaan merupakan alternatif pemecahan terhadap dilema-dilema pengembangan yang kita hadapi.mereka yang berpegang terhadap teori pembangunan model lama juga tidak mudah untuk menyesuaikan diri dengan pandangan-pandangan dan tuntutan keadilan. Mereka yang tidak nyaman terhadap konsep partisipasi dan demokrasi dalam pembangunan tidak akan merasa tentram dengan konsep pemberdayaan ini.

Kartasasmita (1997: 12-13) menjelaskan berbagai bias pemberdayaan masyarakat sebagai suatu paradigma baru pembangunan, yaitu:

1. *Bias pertama,* adalah adanya kecenderungan berpikir bahwa dimensi nasional dari pembangunan lebih penting dari dimensi moralnya, dimensi material lebih penting daripada dimensi kelembagaannya, dan dimensi ekonomi lebih penting dari dimensi sosialnya.
2. *Bias kedua,* adalah anggapan bahwa pendekatan pembangunan yang berasal dari atas lebih sempurna daripada pengalaman dan aspirasi pembangunan di tingkat bawah *(grass root).*
3. *Bias ketiga,* adalah bahwa pembangunan masyarakat banyak di tingkat bawah lebih memerlukan bantuan material dari pada keterampilan teknis dan manajerial.
4. *Bias keempat,* adalah anggapan bahwa teknologi yang diperkenalkan dari atas selalu jauh lebih ampuh daripada teknologi yang berasal dari masyarakar itu sendiri.
5. *Bias kelima,* adalah anggapan bahwa lembaga yang telah berkembang di kalangan masyarakat dinilai tidak efisien dan kurang efektif bahkan menghambat proses pembangunan.
6. *Bias keenam,* adalah bahwa masyarakat di lapisan bawah tidak mengetahui apa yang diperlukan atau bagaimana memperbaiki nasibnya.
7. *Bias ketujuh,* adalah berkaitan dengan di atas, adalah bahwa orang miskin karena bodoh atau malas.
8. *Bias kedelapan,* adalah ukuran efisiensi pembangunan yang salah diterapkan, misalnya ICOR. Diartikan bahwa investasi harus diarahkan pada yang segera menghasilkan bagi pertumbuhan.
9. *Bias kesembilan,* adalah anggapan bahwa sektor pertanian dan pedesaan adalah sektor tradisional, kurang produktif dan tidak memiliki masa investasi yang menunjang, karena itu kurang menarik.
10. *Bias kesepuluh,* adalah berkaitan dengan hal tersebut di atas, adalah ketidakseimbangan dalam akses kepada sumber dana.

Berdasarkan kutipan diatas konsep pemberdayaan merupakan alternatif pemecahan terhadap dilema-dilema pengembangan yang kita hadapi. Dalam bias-bias pemberdayaan ada beberapa suatu paradigma baru dalam pembangunan. Apabila dalam bias-bias tersebut dilakukan dengan baik maka proses pemberdayaan akan berjalan dengan baik

1. **Strategi Pemberdayaan**

Dalam konteks pekerjaan sosial, pemberdayaan dapat dilakukan melalui tiga aras atau matra pemberdayaan *(empowerment setting):* mikro, mezzo, dan makro (Suharto, 2005: 66-67):

* 1. Aras Mikro. Pemberdayaan dilakukan terhadap klien secara individu melalui bimbingan, konseling, *stress management*, dan *crisis intervention.* Tujuan utamanya adalah membimbing atau melatih klien dalam menjalankan tugas-tugas kehidupannya.
	2. Aras Mezzo. Pemberdayaan dilakukan terhadap sekelompok klien. Pemberdayaan dilakukan dengan menggunakan kelompok sebagai media intervensi. Pendidikan dan pelatihan, dinamika kelompok, biasanya digunakan menggunakan strategi dalam meningkatkan kesadaran pengetahuan, keterampilan dan sikap-sikap klien agar memiliki kemampuan memecahkan permasalahan yang dihadapinya.
	3. Aras Makro. Pendekatan ini disebut juga sebagai strategi sistem besar *(large system strategy),* karena sasaran perubahan diarahkan pada sistem lingkungan yang lebih kuat.

Melihat kutipan diatas maka strategi pemberdayaan dibagi menjadi tiga aras, yaitu: yang pertama Aras Mikro adalah pemberdayaan yang dilakukan dengan klien secara individu, yang kedua Aras Mezzo adalah pemberdayaan yang dilakukan dengan menggunakan kelompok sebagai media intervensi, dan yang ketiga Aras Makro adalah merupakan strategi menggunakan sistem yang besar yang diarahkan pada sistem lingkungan yang lebih kuat.

1. **Prinsip Pemberdayaan**

Dubois dan Miley memberi beberapa prinsip yang dapat menjadi pedoman dalam pemberdayaan masyarakat:

* 1. Membangun relasi pertolongan yang: (1) merefleksikan respon empati; (2) menghargai pihak dan hak klien menentukan nasibnya sendiri *(self-determination)*; (3) menghargai perbedaan dan keunikan individu; (4) menekankan kerjasama klien *(client partnership)*.
	2. Membangun komunikasi yang: (1) menghormati martabat dan harga diri klien; (2) mempertimbangkan keragaman individu; (3) berfokus kepada klien; (4) menjaga kerahasiaan klien.
	3. Terlibat dalam pemecahan masalah yang: (1) memperkuat partisipasi klien dalam semua aspek proses pemecahan masalah; (2) menghargai hak-hak klien; (3) merangkai tantangan sebagai kesempatan belajar; (4) melibatkan klien dalam pembuatan keputusan dan evaluasi.
	4. Merefleksikan sikap dan nilai profesi pekerjaan sosial melalui: (1) ketaatan terhadap kode etik profesi; (2) keterlibatan terhadap pengembangan profesional;riset, dan perumusan kebijakan; (3) penerjemahan kesulitan-kesulitan pribadi kedalam isu-isu publik; (4) penghapusan segala bentuk diskriminasi dan ketidaksetaraan kesempatan (Suharto, 2005: 68) dalam Huraerah.

Berdasarkan kutipan diatas prinsip pemberdayaan merupakan suatu pedoman dalam pemberdayaan. Prinsip tersebut harus dipatuhi oleh setiap lapisan masyarakat, agar pemberdayaan berjalalan dengan baik.

**F. Usaha Kecil Menengah**

**1. Pengertian Usaha Kecil Menengah**

Usaha Kecil dan Menengah disingkat UKM adalah sebuah istilah yang mengacu ke jenis usaha kecil yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 200.000.000 tidak termasuk [tanah](http://id.wikipedia.org/wiki/Tanah) dan bangunan tempat usaha, dan usaha yang berdiri sendiri. Menurut Keputusan Presiden RI no. 99 tahun 1998 pengertian Usaha Kecil adalah: “Kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dengan bidang usaha yang secara mayoritas merupakan kegiatan usaha kecil dan perlu dilindungi untuk mencegah dari persaingan usaha yang tidak sehat.”

UKM merupakan salah satu bagian penting dari perekonomian suatu negara maupun daerah, begitu juga dengan negara Indonesia. UKM  ini sangat memiliki peranan penting dalam lajunya perekonomian masyarakat. UKM ini juga sangat membantu negara atau pemerintah dalam hal penciptaan lapangan kerja baru dan lewat UKM juga banyak tercipta unit unit kerja baru yang menggunakan tenaga-tenaga baru yang dapat mendukung pendapatan rumah tangga. Selain dari itu UKM juga memiliki fleksibilitas yang tinggi jika dibandingkan dengan usaha yang berkapasitas lebih besar. UKM ini perlu perhatian yang khusus dan di dukung oleh informasi yang akurat, agar terjadi link bisnis yang terarah antara pelaku usaha kecil dan menengah dengan elemen daya saing usaha, yaitu jaringan pasar.

Kriteria usaha kecil menurut UU No. 9 tahun 1995 adalah sebagai berikut:

1.   Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

2.   Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (Satu Miliar Rupiah).

3.   Milik Warga Negara Indonesia.

4.   Berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang tidak dimiliki, dikuasai, atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Menengah atau Usaha Besar.

5.   Berbentuk usaha orang perorangan , badan usaha yang tidak berbadan hukum, atau badan usaha yang berbadan hukum, termasuk koperasi.

Definisi diatas maka UKM dapat diartikan sebagai usaha – usaha kecil dibidang perekonomian pada suatu daerah, yang menyerap beberapa tenaga kerja. Selain itu UKM juga sangat berpengaruh dalam kegiatan perekonomian yang ada di Indonesia karena hasil dari penjualannya cukup besar.

**2. Peranan UKM di Indonesia**

UKM adalah tulang punggung ekonomi Indonesia. Jumlah UKM hingga 2011 mencapai sekitar 52 juta. UKM di Indonesia sangat penting bagi ekonomi karena menyumbang 60% dari [PDB](http://id.wikipedia.org/wiki/PDB) dan menampung 97% [tenaga kerja](http://id.wikipedia.org/wiki/Tenaga_kerja). Tetapi akses ke lembaga keuangan sangat terbatas baru 25% atau 13 juta pelaku UKM yang mendapat akses ke lembaga keuangan. Pemerintah Indonesia, membina UKM melalui Dinas Koperasi dan UKM, di masing-masing Provinsi atau Kabupaten/Kota.

Data BPS dan Kementerian Koperasi dari seluruh kelas usaha menunjukkan bahwa usaha skala kecil di Indonesia menempati porsi sekitar 99%, artinya hampir seluruh usaha di Indonesia merupakan usaha kecil, hanya 1 % saja usaha menengah dan besar. Perkembangan dan Pertumbuhan UKM pun cukup bagus dari tahun ke tahun. Hampir dari setiap pemerintahan menekankan pada pemberdayaan UKM, maksudnya memberdayakan bukan memperdayai. [Pemerintah](http://www.pustakadunia.com/artikel-pustaka-umum/kebijakan-pemerintah-dalam-pengembangan-tanaman-jagung-di-indonesia/) secara serius dan memberikan perhatian lebih pada sektor usaha ini. Alasannya, usaha kecil ini menjadi tulang punggung penyediaan tenaga kerja, karena perusahaan besar lebih menekankan penggunaan teknologi dari pada tenaga kerja manusia.

UKM mampu menjadi stabilisator dan dinamisator per ekono­mian di Indonesia. Sebagai [negara berkembang](http://www.pustakadunia.com/artikel-pustaka-umum/masalah-ekonomi-di-negara-maju-dan-berkembang/), Indonesia sangat penting memperhatikan UKM. Alasannya, UKM mempunyai kinerja lebih baik dalam tenaga kerja yang produktif, meningkatkan produktivitas tinggi, dan mampu hidup di sela-sela usaha besar. UKM mampu menopang usaha besar, seperti menyediakan bahan mentah, [suku cadang](http://www.pustakadunia.com/artikel-pustaka-umum/gambaran-umum-usaha-bengkel-dan-suku-cadang-kendaraan-bermotor/), dan bahan pendukung lainnya. UKM juga mampu menjadi ujung tombak bagi usaha besar dalam menyalurkan dan menjual produk dari usaha besar ke konsumen.

Kedudukan UKM ini semakin baik, selain mampu me­nyerap tenaga kerja cukup banyak, UKM ini bersifat lincah sehing­ga mampu bertahan di dalam kondisi yang tidak menguntungkan, seperti terjadinya krisis global seperti saat ini. Umumnya, UKM memiliki strategi dengan membuat produk unik dan khusus sehingga tidak bersaing dengan produk dari usaha besar.

UKM merupakan salah satu bagian penting dari perekonomian suatu negara maupun daerah, begitu juga dengan negara Indonesia. UKM  ini sangat memiliki peranan penting dalam lajunya perekonomian masyarakat. UKM ini juga sangat membantu negara atau pemerintah dalam hal penciptaan lapangan kerja baru dan lewat UKM juga banyak tercipta unit unit kerja baru yang menggunakan tenaga-tenaga baru yang dapat mendukung pendapatan rumah tangga. Selain dari itu UKM juga memiliki fleksibilitas yang tinggi jika dibandingkan dengan usaha yang berkapasitas lebih besar. UKM ini perlu perhatian yang khusus dan di dukung oleh informasi yang akurat, agar terjadi link bisnis yang terarah antara pelaku usaha kecil dan menengah dengan elemen daya saing usaha, yaitu jaringan pasar.

Dari pernyataan diatas maka peranan UKM di Indonesia sangatlah vital keberadaannya. Selain itu UKM juga memiliki peranan penting dalam pertumbuhan lajunya perekonomian masyarakat karena UKM sangat membantu untuk membukanya lapangan kerja baru sehingga menyerap angka pengangguran di Indonesia.

**3. Kelebihan UKM**

Dengan ukurannya yang kecil dan tentunya fleksibilitas yang tinggi, usaha kecil menengah memiliki berbagai kelebihan, terutama dalam segi pembentukan dan operasional. UKM memiliki kontribusi besar bagi bergulirnya roda ekonomi suatu negeri, bukan hanya karena ia adalah benih yang memampukan tumbuhnya bisnis besar, melainkan juga karena ia menyediakan layanan tertentu bagi masyarakat yang bagi bisnis besar dinilai kurang efisien secara biaya.

Berikut adalah beberapa kelebihan UKM:

1. Fleksibilitas Operasional

Usaha kecil menengah biasanya dikelola oleh tim kecil yang masing-masing anggotanya memiliki wewenang untuk menentukan keputusan. Hal ini membuat UKM lebih fleksibel dalam operasional kesehariannya. Kecepatan reaksi bisnis ini terhadap segala perubahan (misalnya: pergeseran selera konsumen, trend produk, dll.) cukup tinggi, sehingga bisnis skala kecil ini lebih kompetitif.

1. Kecepatan Inovasi

Dengan tidak adanya hirarki pengorganisasian dan kontrol dalam UKM, produk - produk dan ide-ide baru dapat dirancang, digarap, dan diluncurkan dengan segera. Meski ide cemerlang itu berasal dari pemikiran karyawan bukan pemilik, kedekatan diantara mereka membuat gagasan tersebut cenderung lebih mudah didengar, diterima, dan dieksekusi.

1. Struktur Biaya Rendah

Kebanyakan usaha kecil menengah tidak punya ruang kerja khusus di kompleks-kompleks perkantoran. Sebagian dijalankan di rumah dengan anggota keluarga sendiri sebagai pekerjanya. Hal ini mengurangi biaya ekstra (overhead) dalam operasinya. Lebih jauh lagi, usaha menengah kecil juga menerima sokongan dari pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan bank dalam bentuk kemudahan pajak, donasi, maupun hibah. Faktor ini berpengaruh besar bagi pembiayaan dalam pembentukan UKM dan operasional mereka.

1. Kemampuan Fokus di Sektor yang Spesifik

UKM tidak wajib untuk memperoleh kuantitas penjualan dalam jumlah besar untuk mencapai titik balik (break even point – BEP) modal mereka. Faktor ini memampukan usaha kecil menengah untuk fokus di sektor produk atau pasar yang spesifik. Contohnya: bisnis kerajinan rumahan bisa fokus menggarap satu jenis dan model kerajinan tertentu dan cukup melayani permintaan konsumen tertentu untuk bisa mencapai laba. Berbeda dengan industri kerajinan skala besar yang diharuskan membayar biaya sewa gedung dan gaji sejumlah besar karyawan sehingga harus selalu mampu menjual sekian kontainer kerajinan untuk menutup biaya operasional bulanannya saja.

Dari pernyataan diatas menyatakan bahwa 4 (empat) kelebihan UKM yang bisa dijadikan sumber motivasi dan selalu dipertahankan oleh para pengelola usaha kecil menengah.

**4. Kelemahan UKM**

Ukuran usaha kecil menengah selain memiliki kelebihan juga mengandung kekurangan yang membuat pengelolanya mengalami kesulitan dalam menjalankan tugasnya. Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam mengelola usaha kecil menengah antara lain:

1. Sempitnya Waktu untuk Melengkapi Kebutuhan

Sebab sedikitnya jumlah pengambil keputusan dalam usaha kecil menengah, mereka kerap terpaksa harus berusaha memenuhi kebutuhan pokok bisnisnya, yakni: produksi, sales, dan marketing. Hal ini bisa mengakibatkan tekanan jadwal yang besar, membuat mereka tidak bisa fokus menyelesaikan permasalahan satu persatu.

Tekanan semacam ini bisa muncul tiba-tiba ketika bisnis mereka memperoleh order dalam jumlah yang besar, atau beberapa order yang masuk dalam waktu hampir bersamaan. Lebih dahsyat lagi jika suatu ketika ada lembaga bisnis besar yang merasa terancam dan mulai melancarkan serangan yang tidak fair demi menyingkirkan pesaing potensialnya.

1. Kontrol Ketat atas Anggaran dan Pembiayaan

Usaha skala kecil umumnya memiliki anggaran yang kecil. Akibatnya, ia kerap kali dipaksakan membagi-bagi dana untuk membiayai berbagai kebutuhan seefisien mungkin. Ketidakmampuan untuk mengumpulkan modal yang lebih besar juga memaksa usaha kecil menengah menjalankan kebijakan penghematan yang ketat, terutama untuk mencegah kekurangan pembiayaan operasional sekecil apapun. Kekurangan pembiayaan operasional yang tidak dicegah bisa mengakibatkan kebangkrutan, sebab kapasitas UKM untuk membayar hutang biasanya hampir tidak ada.

1. Kurangnya Tenaga Ahli

Usaha kecil menengah biasanya tidak mampu membayar jasa tenaga ahli untuk menyelesaikan pekerjaan tertentu. Hal ini merupakan kelemahan usaha kecil menengah yang sangat serius. Apalagi jika dibandingkan dengan lembaga bisnis besar yang mampu mempekerjakan banyak tenaga ahli. Kualitas produk barang atau jasa yang bisa dihasilkan tanpa tenaga ahli sangat mungkin berada di bawah standar tertentu. Akibatnya, kemampuan persaingan bisnis skala kecil ini di pasar yang luas bisa sangat kecil.

Pernyataan di atas menyatakan bahwa ada 3 (tiga) kelemahan UKM yang harus diatasi oleh pelaku UKM, agar kegiatan UKM tidak terganggu dan dapat memproduksi barang yang lebih baik dari hasil kerja UKM itu tersebut.

**G. Kebutuhan Dasar**

**1. Pengertian Kebutuhan Dasar**

Sebagai makhluk yang normal manusia memiliki kebutuhan-kebutuhan yang menuntut pemenuhan demi tercapainya kesejahteraan hidupnya. Setiap orang dalam mempertahankan hidup di lingkungan masyarakat selalu dihadapkan pada tantangan dan hambatan dalam memenuhi kebutuhannya untuk mencapai taraf hidup yang lebih layak. Jika suatu kebutuhan telah terpuaskan maka kebutuhan-kebutuhan yang lainnya akan muncul menuntut kepuasan, begitu seterusnya. Pada kenyataannya tidak semua orang dapat memenuhi kebutuhannya tersebut.

Mengutip pendapat Frank G.Globe dalam bukunya Mazhab Ketiga dikatakan bahwa suatu sifat dikatakan sebagai kebutuhan dasar jika memenuhi syarat-syarat berikut ini:

1. Ketidakhadirannya menimbulkan penyakit.
2. Kehadirannya mencegah timbulnya penyakit.
3. Pemulihannya menyembuhkan penyakit.
4. Dalam situasi-situasi tertentu yang sangat kompleks dimana orang bebas memilih, orang yang sedang berkekurangan ternyata mengutamakan kebutuhan-kebutuhan itu dibandingkan jenis-jenis kepuasan lainnya.
5. Kebutuhan itu tidak aktif, lemah atau secara fungsional tidak terdapat pada orang yang sehat (1987: 11).

Kebutuhan adalah sesuatu yang harus diupayakan oleh setiap manusia, kebutuhan manusia itu terbagi dalam beberapa macam, Laird & Laird menguraikan lima tingkatan kebutuhan yang dikutip oleh T. Sumarnonugroho dalam bukunya Sistem Intervensi Kesejahteraan Sosial adalah sebagai berikut:

1. Kebutuhan untuk hidup
2. Kebutuhan merasa aman
3. Kebutuhan untuk bertingkah laku sosial
4. Kebutuhan untuk dihargai
5. Kebutuhan untuk melakukan pekerjaan yang disenangi. (1990: 6)

Pengelompokan kebutuhan yang cukup dikenal adalah dari Abraham H. Maslow yang dikutip oleh Hidayat dalam bukunya Kebutuhan Dasar Manusia adalah sebagai berikut:

1. Kebutuhan fisik (udara, air, makanan, dan lain-lain)
2. Kebutuhan rasa aman (jaringan agar dapat bertahan dalam penghidupan dan kehidupan serta terpuaskan kebutuhan dasarnya secara kesinambungan)
3. Kebutuhan untuk menyayangi dan disayangi
4. Kebutuhan untuk penghargaan (dari dirinya dan pihak lain)
5. Kebutuhan untuk mengaktualisasi diri dan bertumbuh. (2012: 8-9)

Kebutuhan muncul akibat adanya kekurangan dalam diri individu, secara kodrati kehidupan individu senantiasa didorong oleh kebutuhan yang terus menerus muncul. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa jika individu merasakan adanya kekurangan maka ia akan mengalami apa yang disebut dengan kebutuhan.

Moh. Surya dalam bukunya Kesehatan Mental memberikan penjelasan tentang kebutuhan secara rinci sebagai berikut:

1. Kebutuhan merupakan suatu kekurangan universal dikalangan umat manusia dan manusia akan musnah bila kekurangan itu tidak terpenuhi.
2. Suatu kekurangan universal dikalangan manusia yang dapat membantu dan dapat membawa kebahagiaan kepada manusia bila kekurangan itu terpenuhi, walaupun tidak esensial bagi kelangsungan hidup.
3. Sebuah kekurangan dapat dipenuhi secara wajar dengan berbagai benda lain yang diinginkan tidak terpenuhi. (1995: 12)

Berdasarkan pengertian tersebut, dapat diidentifikasi bahwa kebutuhan individu berkaitan erat dengan pola-pola tingkah laku baik secara biologis, psikologis maupun sosiologis dalam upaya memenuhi kebutuhannya. Hal ini jelas bahwa kebutuhan dapat mempunyai arti luas tidak terbatas hanya pada tarap biologis saja tetapi juga dapat pada taraf sosial psikologis.

Dengan demikian bahwa dalam diri individu selalu ada kebutuhan baik disadari maupun tidak menuntut untuk dipenuhi. Adanya pemenuhan kebutuhan tersebut menimbulkan suatu tantangan baik dari dirinya maupun dari lingkungannya. Disadari bahwa dalam lingkungan terdapat sumber-sumber yang dapat memenuhi kebutuhan sekaligus terdapat norma-norma yang mengatur kehidupan manusia. Dalam memenuhi kebutuhannya individu harus dapat menghadapi berbagai masalah yang berasal dari lingkungan dengan sebaiknya.

Menurut definisi diatas kebutuhan dasar merupakan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh setiap individu masyarakat yang apabila kebutuhan-kebutuhan dasarnya telah terpenuhi, maka akan terpenuhi pula keberfungsian sosialnya. Sehingga individu tersebut dapat memiliki kehidupan yang seimbang.

**2. Pendekatan Kebutuhan Dasar**

Pendekatan kebutuhan dasar (*basic needs approach*) telah banyak menarik perhatian di antara peminat studi pembangunan dan lembaga-lembaga internasional seperti ILO dan Bank Dunia. Conyers mengatakan bahwa pendekatan kebutuhan dasar (PKD) adalah sebagai kebijaksanaan pembangunan, baik dalam setiap negara khususnya maupun dunia pada umumnya seharusnya dapat memenuhi kebutuhan dasar bagi seluruh penduduknya. Lebih jauh ia menjelaskan bahwa pendekatan ini banyak mengundang perdebatan mengenai kenyataan apa yang disebut kebutuhan dasar, walaupun secara umum disetujui, bahwa kebutuhan dasar dapat dibagi menjadi tiga kategori. Pertama, ada konsumsi bahan-bahan pokok tertentu seperti pangan, sandang, perumahan (papan) yang dapat dijangkau oleh setiap orang. Kedua, ada pelayanan pokok seperti pendidikan, kesehatan, air bersih yang setiap orang berhak untuk mempunyai akses yang sama. Ketiga, ada hak untuk berpartisipasi dalam membuat dan melaksanakan program yang berpengaruh terhadap pengembangan pribadi. Diasumsikan juga bahwa syarat tenaga kerja produktif merupakan komponen penting dalam memperoleh pendapatan yang akan digunakan untuk rasa kepuasan perorangan yang merupakan pelengkap bagi kebutuhan individu. Dikutip dari Susetiawan dalam Huraerah (2008: 16).

Sementara itu, Emmerijt seperti dikutip oleh Hettne (1982) mengatakan bahwa PKD adalah sebagai strategi egaliteran yang memberikan prioritas lebih tinggi kepada redistribusi daripada pertumbuhan. Para pendukung PKD lebih memilih pendekatan langsung, yakni hubungan langsung antara strategi pembangunan dan penghapusan kemiskinan dari para menunggu hasil “cucuran” dari pertumbuhan. Pendapat serupa juga dikemukakan oleh seorang humanis Indonesia yang pernah menjabat sebagai Rektor United Nations University di Tokyo Jepang, Soedjatmiko (1995: 124) yang mengatakan bahwa PKD merupakan serangan langsung terhadap kemiskinan dunia dengan memenuhi kebutuhan dasar di bidang pangan, nutrisi, kesehatan, pendidikan, dan perumahan. Demikian juga melalui kegiatan-kegiatan yang bias menambah lapangan pekerjaan serta penghasilan di kalangan kelompok-kelompok pendapatan terendah.